

21 Dewan Tetap Lanjutkan Usul Pansus Aset

Pontianak, BERKAT.

Ketua Komisi A DPRD Kalbar, H. Retno Pramudya, SH, mengatakan walaupun sempat gagal diparipurnakan namun sebanyak 21 anggota dari 55 anggota DPRD Kalbar pengusul pembentukan pansus aset yang telah menandatangani persetujuan Pansus Aset DPRD Kalbar dan tetap ingin melanjutkan untuk dibentuknya Pansus Aset. "Ini terbukti kemarin telah dilaksanakannya rapat 21 orang pengusul pansus aset, dan semua dapat menerima dan menginginkan pansus segera dibentuk," jelas Retno didampingi salah seorang pengusul Ir.Sy.Izhar Assyuri, kemarin usai menggelar rapat di gedung DPRD Kalbar.

Retno menjelaskan, kenapa berupa

Pansus Aset yang diusulkan, karena teman-teman anggota berkeyakinan aset pemprov Kalbar ini cukup banyak masalahnya. tidak hanya masalah pengelolaan dan pemanfaatan aset tanah KONI saja, tetapi masih banyak masalah-masalah lainnya yang menyangkut aset-aset tersebut. Haruslah masalah ini segera dibenahi dan diselesaikan permasalahannya. Sehingga kedepannya aset Pemprov Kalbar akan tertata dan terkelola dengan baik, serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat Kalbar.

Sementara itu Ir.Sy.Izhar Assyuri, mengatakan Hasil Penilaian BPK-RI terhadap APBD Kalbar 2011 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ini hanya dikarenakan aset yang belum terdata

secara baik secara administrasi sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). "Untuk itu dalam penyelesaian aset milik Pemerintah Provinsi Kalbar maka sangat diperlukan pembentukan Pansus Aset DPRD Kalbar, supaya perbaikan dan pembenahan aset bisa secara komprehensif sehingga Pemerintah Provinsi Kalbar dalam hal ini Sekda Kalbar dan Biro Keuangan dan Pengelolaan aset bisa mengelolanya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)," jelas Izhar.

Yang jelas penyelesaian masalah aset tidak cukup dengan DPRD Kalbar membentuk Panitia Kerja (Panja) harus dengan Pansus. "Pembentukan pansus bukan bermuatan politik tapi kita ingin

pengelolaan aset bisa sesuai dengan SAP dan tidak menjadi temuan BPK-RI kedepannya," katanya.

Izhar menambahkan, antara membentuk Panja dan Pansus bedanya hanya jumlah anggota saja, kalau Pansus itu diperkirakan setengah dari jumlah anggota DPRD Kalbar 55 orang, sedangkan untuk biaya biaya kurang lebih.

Banyak aset yang harus diambil alih oleh Pemerintah Provinsi yang sekarang sudah diambil alih oleh pihak ketiga, kemudian ada juga aset yang harus dikelola oleh kabupaten dan kota seperti Akademi Keperawatan Sintang, rumah sakit RSUD Agoesdjam, RS Abdul Aziz Singkawang supaya bisa lebih berkembang dan lain sebagainya. (aca)